



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI MURTOPO SIMBOLON
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
3. NHK : 677701

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	761.660.000
1. Tanah Seluas 86 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 98.642.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/169 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 462.254.000		
3. Tanah Seluas 87 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 99.789.000		
4. Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 100.975.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	198.000.000
1. MOBIL, DODGE JOURNEY 2.4AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 198.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	72.141.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.040.801.000
III. HUTANG	Rp.	173.332.945
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	867.468.055

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.